

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Identifikasi Potensi Wilayah

Identifikasi Potensi Wilayah (IPW) merupakan suatu proses analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan budaya di suatu wilayah (Febrianto dkk, 2020). Tujuan utama dari IPW adalah untuk memahami secara komprehensif karakteristik dan potensi suatu wilayah guna merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna (Kenangkinayu, 2022). Dalam konteks pertanian, IPW menjadi penting karena memberikan landasan bagi penyuluhan pertanian untuk merancang program-program yang tepat sasaran dan berdampak maksimal dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Pelaksanaan Identifikasi Potensi Wilayah (IPW) dalam pengkajian ini akan menggunakan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA). Menurut Prayitno (2023) metode RRA (*Rapid Rural Appraisal*) adalah metode cepat yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi wilayah secara efisien, terutama dalam konteks penyuluhan pertanian dan pembangunan pedesaan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kecepatan, partisipasi masyarakat, pendekatan multidisipliner, serta triangulasi data untuk meningkatkan validitas hasil. Proses RRA diawali dengan tahap perencanaan dan persiapan, di mana tim yang terdiri dari berbagai ahli menyusun tujuan, metode, dan alat bantu seperti peta, kuesioner, serta panduan wawancara. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), *transect walk*, dan pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat setempat. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan informasi ke dalam aspek sumber daya alam, sosial-ekonomi, dan kelembagaan untuk mengidentifikasi potensi unggulan serta hambatan yang dihadapi. Hasil analisis kemudian dirangkum dalam laporan yang berisi rekomendasi strategi pengembangan wilayah, termasuk usulan program penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penyuluhan pertanian, RRA sangat bermanfaat untuk menentukan jenis tanaman atau komoditas unggulan yang sesuai dengan kondisi agroekologi, memilih metode penyuluhan yang efektif, serta mengembangkan program yang berbasis pada kebutuhan riil

petani. Dengan demikian, penerapan RRA dapat membantu perencanaan penyuluhan pertanian agar lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi pengembangan wilayah pedesaan.

2.1.2. Pemanfaatan Pupuk Organik Pada Tanaman Jagung

Pemanfaatan pupuk organik pada tanaman jagung didasarkan pada prinsip-prinsip agronomi dan ilmu tanah yang menekankan pentingnya meningkatkan kualitas tanah dan kesehatan tanaman melalui penggunaan bahan organik alami. Pupuk organik didefinisikan sebagai bahan yang berasal dari sisa-sisa organisme hidup, seperti kompos, pupuk kandang, hijauan, limbah pertanian, dan limbah industri. Penggunaan pupuk organik dalam budidaya jagung telah menjadi topik penelitian yang menarik karena potensinya dalam meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen, dan keberlanjutan lingkungan.

Pupuk organik merupakan elemen penting dalam praktik pertanian berkelanjutan yang semakin mendapat perhatian global. Landasan utama penggunaan pupuk organik terletak pada manfaatnya yang holistik, baik bagi tanaman, tanah, maupun lingkungan secara keseluruhan. Pertama-tama, pupuk organik memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesehatan tanah. Dengan menambahkan bahan organik seperti kompos, kotoran hewan, atau sisa tanaman ke dalam tanah, pupuk organik memperbaiki struktur tanah, meningkatkan retensi air, dan memberikan kehidupan mikroba tanah yang kaya (Putra dan Ratnawati, 2019). Proses ini berkontribusi pada peningkatan kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta meminimalkan kebutuhan akan bahan kimia sintetis yang dapat merusak struktur tanah dalam jangka panjang.

Sarifuddin et al. (2020) menemukan bahwa aplikasi pupuk organik berbasis kompos pada tanaman jagung dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, produksi biomassa, dan hasil panen. Selain itu, penelitian oleh Hadi et al. (2019) menunjukkan bahwa pupuk organik juga berpotensi untuk mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia dan meningkatkan ketahanan pangan serta keberlanjutan sistem pertanian. Nutrisi yang terkandung dalam pupuk organik dilepaskan secara perlahan ke tanah, menciptakan lingkungan yang optimal bagi tanaman untuk menyerap nutrisi (Harahap dkk, 2020). Hal ini membantu mencegah overdosis nutrisi yang dapat terjadi dalam penggunaan pupuk kimia konvensional.

Keberagaman nutrisi yang terdapat dalam pupuk organik juga menciptakan kondisi yang lebih seimbang, memberikan tanaman akses ke berbagai unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal. Ketersediaan nutrisi yang berkelanjutan dari pupuk organik juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan hama (Widyabudiningsih dkk, 2021).

Penggunaan pupuk organik tidak hanya memberikan manfaat bagi tanaman, tetapi juga memiliki dampak positif pada lingkungan secara keseluruhan. Pupuk organik diproduksi dari bahan-bahan alami yang dapat diurai oleh mikroorganisme tanah, menghasilkan residu yang lebih sedikit dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pupuk kimia (Purnomo, 2020).

Pupuk organik juga mendukung keberlanjutan pertanian dengan merangsang ekonomi petani lokal. Produksi pupuk organik sering melibatkan pemanfaatan sisa-sisa pertanian dan limbah organik lokal, menciptakan siklus yang berkelanjutan dalam rantai pasokan pertanian. Selain itu, pupuk organik dapat dihasilkan secara lokal, mengurangi ketergantungan pada impor pupuk kimia yang sering kali mahal dan berdampak buruk pada ekonomi lokal.

2.1.3. Tujuan Penyuluhan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), tujuan penyuluhan adalah memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi. Dengan kata lain tujuan penyuluhan adalah merubah perilaku petani dari segi kognitif, afektif dan konatif dan diharapkan petani dapat mandiri dan mencapai kesejahteraannya.

Penetapan tujuan dalam kegiatan penyuluhan pertanian harus mengacu pada prinsip SMART sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Prinsip SMART mencakup lima unsur penting, yaitu: *Specific* (spesifik), yang berarti kegiatan penyuluhan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan khusus dari sasaran penyuluhan; *Measurable* (terukur), yaitu tujuan yang ditetapkan harus dapat diukur sehingga memungkinkan evaluasi terhadap keberhasilannya dalam jangka pendek maupun panjang; *Actionary* (dapat

dilaksanakan), yaitu tujuan penyuluhan harus dapat dicapai dan dilaksanakan oleh petani agar menghasilkan dampak nyata; *Realistic* (realistik), yakni tujuan harus sesuai dengan kemampuan dan kondisi petani, tidak berlebihan atau di luar jangkauan; serta *Time Frame* (jangka waktu), yang menunjukkan bahwa tujuan harus memiliki batas pencapaian yang jelas.

Selain itu, dalam merumuskan tujuan penyuluhan juga perlu memperhatikan empat unsur tambahan, yaitu: *Audience* (sasaran), di mana tujuan harus secara spesifik ditujukan kepada khalayak sasaran penyuluhan; *Behaviour* (perubahan perilaku), yaitu tujuan harus mengarah pada perubahan perilaku yang diinginkan; *Condition* (kondisi yang ingin dicapai), yaitu tujuan perlu menggambarkan kondisi akhir yang diharapkan setelah kegiatan penyuluhan dilakukan; serta *Degree* (tingkat pencapaian), yaitu tujuan harus menetapkan tingkat atau derajat perubahan yang ingin dicapai. Seluruh unsur ini penting untuk memastikan bahwa tujuan penyuluhan pertanian dapat dirumuskan dengan jelas, terukur, dapat dilaksanakan, dan relevan dengan kebutuhan petani serta dapat dicapai dalam kurun waktu yang ditetapkan.

2.1.4. Sasaran Penyuluhan Pertanian

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) sasaran penyuluhan adalah pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran utama meliputi pelaku utama dan pelaku usaha. pelaku utama bidang pertanian yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya. Pelaku usaha bidang pertanian yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2018). Sedangkan sasaran antara yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

Pemilihan sasaran penyuluhan pertanian berdasarkan karakteristik sasaran, demografis, sosial, dan ekonomi didasarkan pada pemahaman yang mendalam

tentang kebutuhan, keberagaman, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat petani. Widiatmaka et al. (2018) menekankan pentingnya mempertimbangkan karakteristik sosial seperti tingkat pendidikan, gender, dan struktur keluarga dalam merancang program penyuluhan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, faktor demografis seperti usia, pengalaman bertani, dan kepemilikan lahan juga mempengaruhi preferensi, persepsi, dan kapasitas petani dalam menerima dan mengadopsi inovasi pertanian (Purnomo et al., 2020).

Tinjauan terhadap penelitian di lapangan menunjukkan bahwa mempertimbangkan karakteristik ekonomi masyarakat petani, seperti tingkat pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan ketergantungan pada sektor pertanian, juga penting dalam menetapkan prioritas penyuluhan pertanian (Arifin & Sukartini, 2021). Hal ini karena kondisi ekonomi memengaruhi ketersediaan dan kemampuan petani untuk mengadopsi teknologi atau praktik pertanian baru yang diajukan melalui program penyuluhan.

Dalam kesimpulannya, teori menentukan sasaran penyuluhan pertanian berdasarkan karakteristik sasaran, demografis, sosial, dan ekonomi memberikan landasan yang kuat untuk merancang program penyuluhan yang tepat sasaran dan berdampak. Melalui pemahaman yang holistik tentang masyarakat petani dan konteks sosial-ekonomi di mana mereka berada, penyuluhan pertanian dapat mengidentifikasi kebutuhan, aspirasi, dan potensi petani dengan lebih baik, sehingga meningkatkan efektivitas dan relevansi program-program penyuluhan.

2.1.5. Materi Penyuluhan Pertanian

Salah satu kegiatan utama dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah penyampaian informasi dan teknologi pertanian dengan menggunakan materi penyuluhan pertanian. Di bidang penyuluhan, materi penyuluhan diartikan sebagai pesan yang akan disampaikan oleh penyuluh kepada sasaran penyuluhan. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, materi penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajeman, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.

Menurut Bengu dkk (2020), informasi pertanian memiliki cakupan sebagai berikut:

1. Pengalaman praktik para petani yang telah berhasil baik dari wilayah yang bersangkutan maupun dari luar wilayah yang mempunyai kondisi agroklimat yang hampir serupa.
2. Hasil-hasil pengujian, terutama berdasarkan hasil dari pengujian lokal
3. Rekomendasi yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
4. Keterangan pasar berupa catatan harga produk pertanian, penawaran dan permintaan akan saran produksi dan pengolahan hasil pertanian.
5. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah setempat, berkaitan dengan sektor pertanian seperti halnya kebijakan harga dasar, peraturan tentang permohonan dan pengembalian kredit dan lain-lain.

2.1.6. Metode Penyuluhan Pertanian

Metode penyuluhan pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2009). Metode penyuluhan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian, tujuan dari metode penyuluhan antara lain: mempercepat serta mempermudah penyampaian materi dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian; meningkatkan efisien dan efektivitas dalam penyelenggaraan serta pelaksanaan penyuluhan pertanian; mempercepat dan mempermudah adopsi inovasi dan teknologi pertanian.

Tujuan utama dalam memilih metode penyuluhan pertanian adalah untuk menentukan metode tunggal atau kombinasi beberapa metode yang paling sesuai guna mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pemilihan metode ini bertujuan agar proses penyuluhan berjalan secara efisien dan

efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan metode penyuluhan meliputi lima aspek utama, yaitu: tahap serta kemampuan adopsi inovasi oleh petani, karakteristik sasaran penyuluhan, ketersediaan sumber daya, kondisi wilayah tempat penyuluhan berlangsung, serta kebijakan pemerintah yang relevan. Pertimbangan tersebut juga harus selaras dengan materi yang akan disampaikan dan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penyuluhan.

Berdasarkan pendapat Imran, Muhanniah, dan Giono (2019), metode seperti demplot, anjangsana, pelatihan, sekolah lapang, studi banding, dan temu wicara terbukti secara signifikan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Efektivitas metode penyuluhan ini sangat berkaitan dengan penerapan teknologi pertanian, di mana kegiatan seperti pertemuan rutin dan demplot terbukti sangat bermanfaat bagi petani dalam mengadopsi teknologi budidaya. Selain itu, hasil penelitian oleh Mardiyanto, Samijan, dan Nurlaily (2020) menunjukkan bahwa metode pelatihan, demplot, dan temu lapang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penyuluhan dalam menyebarluaskan teknologi pertanian.

Menurut Mardiyanto dkk (2020), metode penyuluhan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) sesuai dengan pendekatan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan individu, dalam hal ini penyuluhan berhadapan secara langsung maupun tidak langsung dengan petani dan keluarga petani (misalnya anjangsana).
- b. Pendekatan kelompok, penyuluhan berhubungan dengan kelompok tani maupun sekelompok sasaran (diskusi, temu karya, temu seni dan demonstrasi).
- c. Pendekatan massal, penyuluhan menyampaikan pesan atau informasi kepada sasaran dalam jumlah banyak (pertemuan umum).

2.1.7. Media Penyuluhan Pertanian

Media penyuluhan merupakan alat bantu yang digunakan untuk mempermudah proses penyampaian materi kepada peserta atau sasaran penyuluhan. Menurut Leilani, Nurmalia, dan Patekkai (2017), media penyuluhan mencakup segala bentuk sarana yang memuat pesan atau informasi yang dapat

menunjang kelancaran kegiatan penyuluhan. Penggunaan media bertujuan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara penyampai pesan dengan masyarakat atau kelompok sasaran. Media memiliki berbagai manfaat, antara lain mempercepat dan mempermudah pemahaman sasaran terhadap informasi yang disampaikan, mampu menjangkau lebih banyak peserta, menyediakan informasi yang tepat dan akurat, serta menyajikan materi secara lebih konkret melalui unsur visual maupun gerak. Selain itu, media bersifat lebih menarik dan komunikatif, menciptakan suasana belajar yang menyerupai kondisi kerja nyata, merangsang berbagai indera, serta bisa dimanfaatkan dalam bentuk latihan kerja dan simulasi. Penggunaan media juga membantu menciptakan rangsangan yang seragam, sehingga pengalaman belajar dan persepsi yang terbentuk di kalangan peserta menjadi lebih konsisten.

Dalam memilih media penyuluhan, beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain tujuan dari perubahan yang ingin dicapai, karakteristik sasaran, strategi komunikasi yang digunakan, isi pesan yang akan disampaikan, ketersediaan anggaran, serta kondisi wilayah tempat penyuluhan dilaksanakan (Leilani dkk., 2017). Media yang tepat akan membantu peserta memperoleh pengalaman belajar yang relevan dengan minat, kemampuan, serta latar belakang mereka. Meskipun media penyuluhan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, hal yang terpenting bukanlah klasifikasinya, melainkan bagaimana media tersebut digunakan secara tepat dan sesuai konteks. Setiap jenis media memiliki keunggulan, keterbatasan, serta karakteristik yang unik, sehingga media yang efektif dalam satu situasi belum tentu cocok digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, pemilihan media harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik dari penyuluhan yang akan dilaksanakan. Jenis pemilihan media harus berdasarkan karakteristik dan contoh dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Media dan Contohnya

No	Jenis Media	Contoh
1	Media penyuluhan cetak	Gambar, Sketsa, Foto, Poster, Folder, Peta singkap, Kartu kilat, Diagram, Grafik, Bagan, Peta, Brosur, Majalah, Buku - Kelebihannya : Relatif tahan lama, dapat dibaca berulang-ulang, dapat digunakan sesuai kecepatan belajar masing-masing, mudah dibawa dsb.

Lanjutan Tabel 1.

No	Jenis Media	Contoh
		<ul style="list-style-type: none">- Kelemahannya : Proses penyampaian sampai pencetakan butuh waktu relatif lama, sukar menampilkan gerak, membutuhkan tingkat literasi yang memadai, cenderung membosankan bila padat dan panjang.
2	Media penyuluhan audio	<p>Kaset, CD, DVD, MP3, MP4 Audio</p> <ul style="list-style-type: none">- Kelebihannya : Informasi dikemas sudah tetap, terpatri dan tetap sama bila direproduksi. Produksi dan reproduksinya tergolong ekonomis dan mudah didistribusikan- Kelemahannya : Bila terlalu lama akan membosankan, perbaikan atau revisi harus memproduksi master baru
3	Media penyuluhan audio visual/terproyeksi	<p>Slide Film, Movie Film, Film Strip, Video (VCD,DVD) Film, Televisi, Komputer (Interaktif, Presentasi)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kelebihan : Dapat memberikan gambaran yang lebih kongkrit, baik dari unsur gambar maupun gerakan, lebih atraktif dan komunikatif.- Kelemahan : Biaya produksi relatif mahal, produksi memerlukan waktu dan diperlukan peralatan yang tidak murah

Sumber: Yulida dkk (2017); Nurdianti dan Qifary (2022)

2.1.8. Volume Penyuluhan

Volume penyuluhan pertanian merupakan ukuran seberapa luas dan seberapa banyak kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu. Volume mencakup serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, kesejahteraan, dan keberlanjutan sektor pertanian (Safitri, 2021).

Parameter yang digunakan untuk mengevaluasi volume kegiatan penyuluhan meliputi jumlah program atau kegiatan penyuluhan yang diadakan, jumlah peserta atau petani yang terlibat, sejauh mana jangkauan geografis kegiatan penyuluhan, serta alokasi sumber daya yang digunakan dalam implementasi program-program penyuluhan. Evaluasi terhadap volume pelaksanaan kegiatan penyuluhan membantu dalam memahami sejauh mana aktivitas penyuluhan dilakukan, seberapa besar dampak yang dapat diberikan terhadap petani, dan sejauh

mana dukungan bagi peningkatan sektor pertanian secara keseluruhan (Anwarudin, 2020).

2.1.9. Lokasi Penyuluhan

Lokasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian adalah tempat atau wilayah di mana kegiatan penyuluhan dilakukan. Pemilihan lokasi ini menjadi sangat penting karena mempengaruhi seberapa efektif dan relevan pesan penyuluhan bagi masyarakat petani yang menjadi sasarannya. Lokasi pelaksanaan ini bisa bervariasi tergantung pada jenis program, target audiens, dan tujuan dari kegiatan penyuluhan itu sendiri (Anwaruddin, 2020).

Pemilihan lokasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian harus mempertimbangkan karakteristik demografis, geografis, serta kebutuhan masyarakat petani di daerah tersebut. Hal ini membantu dalam menyediakan informasi yang relevan dan solusi yang sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi petani, serta meningkatkan efektivitas dan penerapan praktik pertanian yang diberikan (Safitri, 2021).

2.1.10. Waktu Penyuluhan

Waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian memiliki peran sentral dalam keberhasilan penyampaian informasi yang relevan kepada petani. Penentuan waktu harus memperhatikan siklus pertanian, terutama menjelang atau selama musim tanam, sehingga informasi yang disampaikan dapat segera diaplikasikan oleh para petani. Selain itu, penyesuaian waktu juga perlu memperhitungkan ketersediaan petani untuk berpartisipasi agar pesan penyuluhan dapat tersampaikan dengan efektif. Menghindari bentrokan dengan acara lain serta mempertimbangkan perubahan iklim dan musim turut menjadi pertimbangan penting. Jadwal penyuluhan yang tepat waktu memungkinkan penyampaian informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual para petani, mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam upaya meningkatkan hasil pertanian dan keberlanjutan sektor pertanian secara menyeluruh (Anwarudin, 2020).

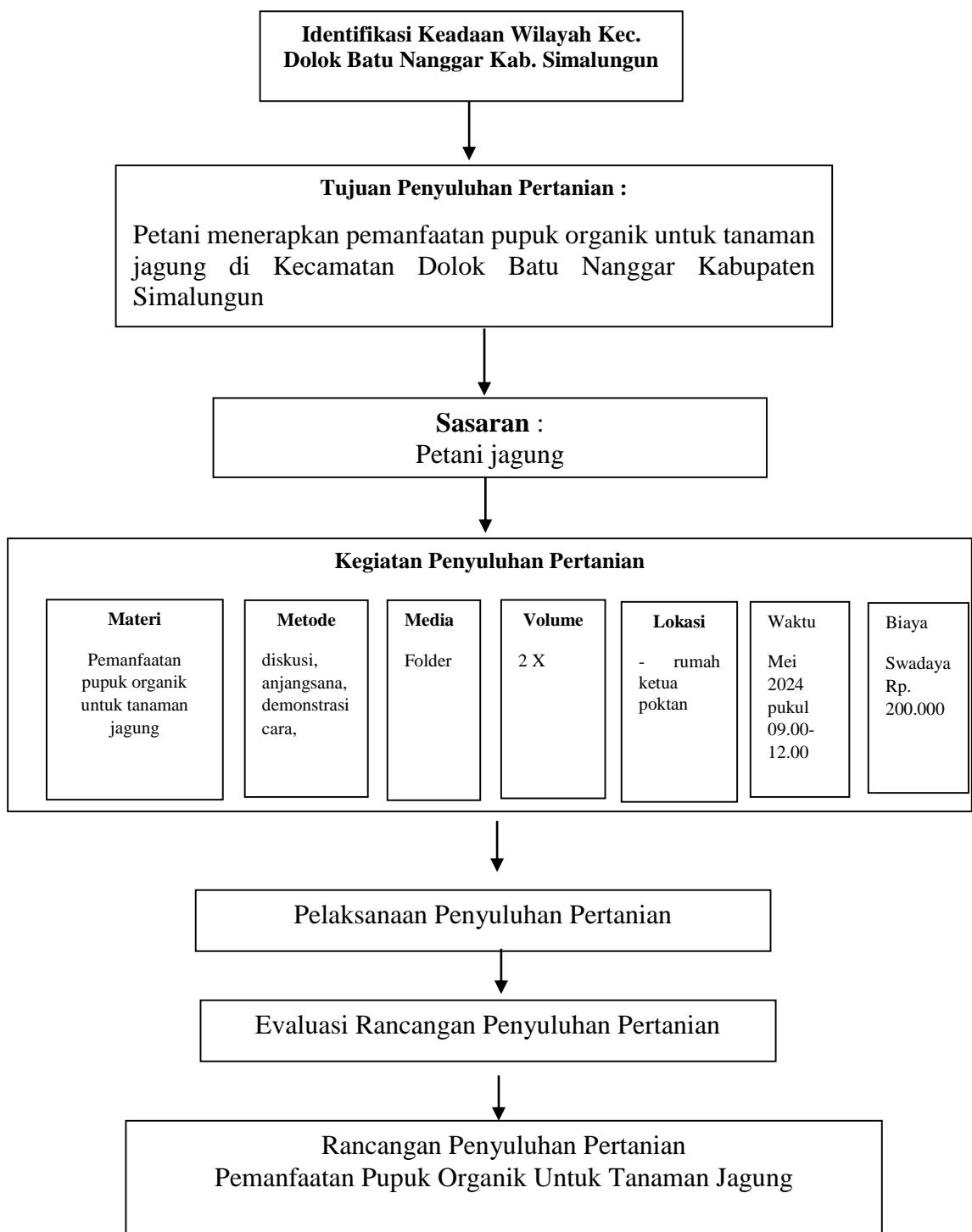
2.1.11. Biaya Penyuluhan

Menurut Safitri (2020) biaya merupakan jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa atau

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam konteks kegiatan penyuluhan pertanian atau bidang lainnya, biaya mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu kegiatan. Ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti gaji personel, transportasi, akomodasi, materi, peralatan, fasilitas, promosi, evaluasi, administrasi, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Biaya tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup pengorbanan sumber daya lain seperti waktu dan tenaga. Manajemen biaya yang efektif penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan suatu kegiatan atau proyek.

2.2. Kerangka Pikir

Kusumasutri (2019), kerangka pikir merupakan konsep dari sebuah penelitian karena merupakan salah dasar dari jawaban sementara permasalahan yang diidentifikasi, oleh karena itu kerangka pikir merupakan salah satu bagian dari kajian teori yang sangat penting agar pelaksanaan penelitian berjalan sesuai dengan rumusan masalah khususnya tujuan penelitian.



Gambar 1. Kerangka Pikir